

MELALUI APBD PERUBAHAN 2024

Pemkot Bangun RTH Publik di Kampung Mendungan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya membangun ruang terbuka hijau (RTH) publik di kawasan Kampung Mendungan Giwangan Umbulharjo. Fasilitas umum tersebut menyusul empat RTH publik yang sudah terbangun sebelumnya pada tahun ini.

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Rina Aryati Nugraha, menjelaskan pada akhir tahun ini hanya menambah satu RTH publik. "Pembangunannya berdasarkan usulan masyarakat dan diakomodasi melalui APBD perubahan tahun ini," jelasnya, Rabu (20/11).

Lokasi RTH publik yang dibangun menggunakan APBD perubahan 2024 tepatnya berada di RT 43 RW 11 Kampung Mendungan. Saat ini pembangunannya masih berlangsung dengan durasi sekitar 45 hari. RTH publik baru di Kampung Mendungan itu dibangun

pada lahan seluas sekitar 500 meter persegi. Lahan tersebut milik Pemkot Yogya yang telah dibeli beberapa tahun lalu yang memang tujuannya untuk pembangunan RTH publik.

Terkait kebutuhan anggaran, Rita menjelaskan sekitar Rp 150 juta. Tahapan pembangunan RTH publik itu baru tahap penataan landscape sedangkan fasilitas penunjang akan dialokasikan pada tahun depan.

Konsep penataan RTH publik di Mendungan seperti sarana serupa berbasis kampung di wilayah lainnya. Selain mengutamakan ruang hijau untuk vegetasi tanaman, juga akan

dilengkapi dengan pendopo guna kegiatan masyarakat. Termasuk fasilitas toilet dan sarana bermain anak. Dia menyebut di Kota Yogya saat ini ada sekitar 63 RTH publik berbasis kampung. Dengan penambahan pembangunan RTH publik baru di Mendungan akan menjadi 64 RTH publik. Pemkot Yogya sebelumnya sudah membangun sekitar empat RTH publik dengan APBD murni 2024 yang tersebar di empat wilayah. "Hampir semua wilayah kelurahan sudah ada RTH publik berbasis kampung. Yang belum ada di Gowongan, karena mungkin belum ada usulan dan tidak ada lahan yang dijual. Tapi kami tetap mengupayakan semua ada RTH publik," urainya.

Selain itu DLH Kota Yogya juga akan mengupayakan semua RTH publik yang dibangun bisa ramah anak

atau mendekati kriteria ramah anak. Hal itu menyusul adanya satu RTH publik di Kota Yogya yang meraih predikat ruang bermain ramah anak dari hasil audit standarisasi ruang bermain ramah anak (RBRA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

"Kita ke depan berharap kalau anggaran mencukupi meskipun di kampung yang tidak terlalu luas lahannya kita berharap ramah anak atau mendekati kriteria ramah anak. Karena faktor keluasan kecil seperti mainan kita belum bisa memenuhi skor jumlah maksimal. Seperti RTH publik di Mendungan meskipun baru landscape sudah ada mainan anak meski baru sederhana," papar Rina.

Menurutnya masyarakat di perkotaan membutuhkan ruang dan tempat

terbuka hijau. Selain untuk ruang hijau publik, juga sebagai tempat berinteraksi masyarakat. Keberadaan RTH publik di Kota Yogya dibangun untuk semua masyarakat segala usia.

Secara terpisah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Giwangan Slamet Haryanto, menyambut baik pembangunan RTH publik di Mendungan Giwangan. Selama ini di wilayah itu cukup padat pemukiman sehingga ruang terbuka hijau dan berinteraksi masyarakat terbatas. "Ini dulu tanah warga. Tahun 2019 kami usulkan pembelian lahan ke Pemkot Yogya. Dua tahun lalu terlaksana sekaligus diusulkan untuk RTH publik. Terima kasih sekali, dengan seperti ini kita bisa interaksi dan bagaimana merawat bumi dengan ruang terbuka hijau publik," jelasnya. **(Dhi)-f**

TERCATAT 29.160 TITIK DI 45 KELURAHAN

Metode Biopori Efektif Olah Sampah Organik

YOGYA (KR) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya akan terus mengoptimalkan keberadaan biopori yang sudah terpasang di wilayah. Metode tersebut dinilai sangat efektif dalam mengolah sampah organik yang dihasilkan masyarakat meski dengan keterbatasan lahan yang ada.

Plt Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup DLH Kota Yogya Lusiningsih, menjelaskan saat ini tercatat ada 29.160 biopori yang terpasang. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah lantaran proses pendataan terus dilakukan. "Kami terus memantau serta melakukan evaluasi dan koordinasi. Sehingga akan menghasilkan data-data yang valid. Selain itu, alat peraga yang diberikan dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara maksimal baik oleh Forum Bank Sampah (FBS) maupun bank sampah yang ada di wilayah," jelasnya, Rabu (20/11).

Apalagi pada tahun ini pihaknya mengelola dana keistimewaan (danais) untuk

kepentingan edukasi dan praktik pembuatan kompos skala rumah tangga dengan metode biopori. Pelaksanaan pembuatan biopori tersebut sudah dilaksanakan secara serentak pada Juli 2024 lalu. Sebagai tindak lanjut pemasangan biopori by name by address di 45 kelurahan, DLH Kota Yogya juga terus mengajak penerima manfaat untuk dapat menjaga dan memaksimalkan biopori dengan sebaik-baiknya.

Lusiningsih menambahkan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya FBS tingkat kota dan 689 bank sampah yang tersebar di wilayah. Terutama kaitannya tentang cara pembuatan dan pemanfaatan biopori sehingga dapat mempercepat implementasi biopori di tingkat rumah tangga. "Kami berharap dari FBS, bank sampah dan pemerintah terjalin komunikasi yang cukup intens. Sehingga permasalahan penguatan kelembagaan ke depannya terbuka," ungkapnya. Sementara itu, Ketua Sampah Gempita

Kelurahan Suryatmajan Lucy Okyta Purba, mengungkapkan dengan tambahan biopori yang diberikan oleh pemerintah melalui Danais 2024, diharapkan bank sampah semakin diperluas. Tidak hanya untuk pengelolaan sampah tetapi juga dapat membantu bank sampah lainnya jika mengalami kesulitan dalam proses pemanfaatan biopori.

Menurutnya, meskipun Kota Yogya memiliki lahan terbatas namun metode biopori dapat diterapkan dengan mudah di halaman rumah atau kawasan pemukiman padat. Ia pun berharap upaya pemerintah melalui DLH Kota Yogya dalam memberikan biopori di 45 kelurahan menjadi alternatif dalam menekan angka sampah di Kota Yogya sekaligus meminimalisir sampah yang dibuang ke depo. "Saya berharap dengan upaya yang dilakukan pemerintah, sampah organik dapat dimasukkan ke biopori dan sampah anorganik disetorkan ke bank sampah. Sehingga, dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat," harapnya. **(Dhi)-f**

DPP PPSSI Gelar Pelatihan Sterilisasi Tingkat Lanjut

YOGYA (KR) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Praktisi Sentral Sterilisasi Indonesia (PPSSI) berkolaborasi dengan DPD PPSSI DIY menggelar Pelatihan Sterilisasi Tingkat Lanjut bagi Pengelola Sterilisasi di Rumah Sakit pada 19-23 November 2024 di Hotel Cordela Kartika Dewi Malioboro Yogyakarta.

Ketua Umum DPP PPSSI, Nina Kirana Poetri SKP MMRS menuturkan, pelatihan kali ini merupakan pelatihan sterilisasi tingkat lanjut yang pertama kali diselenggarakan menggunakan Kurikulum Kemenkes. Antusias peserta cukup tinggi, namun sesuai ketentuan Kemenkes hanya dibatasi 30 peserta (pengelola sterilisasi di rumah sakit) yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

"Peserta pelatihan tingkat lanjut ini sebelumnya telah mengikuti pelatihan tingkat dasar. Setelah menyelesaikan pelatihan, nantinya peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi atau satuan kredit," terang Poetri kepada KR di sela kegiatan, Selasa (19/11). Turut mendampingi Ketua DPD PPSSI DIY Marsum AmdKL sekaligus wakil ketua panitia dan Ketua Panitia Ns Siti Rohani SKep MKM CVRN FISQUA CRCST. Saat ini sudah terbentuk 16 DPD PPSSI di seluruh Indonesia.



KR-Devid Permama

Para pengelola unit sterilisasi rumah sakit saat mengikuti pelatihan tingkat lanjut.

Menurut Poetri, keberadaan unit sterilisasi di rumah sakit sangat penting untuk menekan terjadinya infeksi. Oleh karena itu para pengelola unit sterilisasi di rumah sakit perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pelatihan-pelatihan.

"Berbeda dengan kedokteran atau keperawatan yang ada sekolahnya, sterilisasi ini tidak ada sekolahnya, sehingga penting untuk mengikuti pelatihan-pelatihan," ujarnya. Lebih lanjut dikatakan Poetri, banyak keuntungan yang didapat oleh rumah sakit, ketika pengelola unit sterilisasinya terampil dan telah bersertifikat. Antara lain dapat memberikan pelayanan sterilisasi yang bermutu dan sesuai standar, sehingga kejadian infeksi bisa dihindari. Dan bagi rumah sakit bisa mendukung

akreditasi.

Marsum menambahkan, saat ini pengetahuan dan keterampilan tentang sterilisasi di rumah sakit sangat dibutuhkan. Oleh karena itu PPSSI rutin menggelar pelatihan-pelatihan untuk mengupdate pengetahuan para pengelola unit sterilisasi di rumah sakit. Tak hanya itu setiap tahun, PPSSI rutin menyelenggarakan agenda besar pertemuan ilmiah tahunan dengan menghadirkan narasumber nasional maupun internasional.

"Kami (PPSSI) berharap semua pengelola sterilisasi di rumah sakit memiliki keterampilan tentang sterilisasi untuk mencegah terjadinya infeksi di rumah sakit. Keterampilan dan pengetahuan itu salah satunya bisa didapat dari pelatihan-pelatihan seperti ini," pungkasnya **(Dev)-f**

Perkuat Komitmen DIY Sebagai Smart Province

YOGYA (KR) - Jogja Smart Province merupakan visi besar yang sejak awal telah menjadi komitmen bersama. Untuk itu sangat penting memperkuat komitmen untuk mewujudkan DIY sebagai provinsi cerdas yang inovatif, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

"Inisiatif ini telah dimulai sejak tahun 2006 melalui penerapan konsep Digital Government Services. Kini, kita telah memiliki Master Plan Smart Province yang menuntun setiap langkah kita dalam menyelenggarakan teknologi dengan kebutuhan masyarakat," kata Sekda DIY, Beny Suharsono saat memberikan arahan dalam Rapat Tim Gugus Tugas Smart Province DIY di The Malioboro Hotel, Selasa (19/11).

Beny mengatakan, master plan tersebut bukan hanya sekadar panduan. Tetapi bukti nyata kesungguhan dalam mendukung transformasi DIY menjadi provinsi yang mengutamakan kualitas hidup masyarakat, inovasi, dan kelestarian lingkungan. Di balik itu semua, kunci keberhasilan dari implementasi hal tersebut adalah kolaborasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak.

"Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Tim Gugus Tugas Smart Province atas kerja keras dan dedikasi yang terus ditunjukkan. Implementasi Smart Province adalah bukti bahwa DIY mampu bersaing di tingkat nasional dalam penerapan teknologi di sektor publik," terangnya.

Beny berharap, semua pihak dapat mengidentifikasi berbagai langkah inovatif yang memungkinkan percepatan program Smart Province, khususnya dalam menghadapi isu-isu strategis. Misalnya, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

"Mari kita perkuat komitmen bersama untuk menjadikan teknologi sebagai alat yang mempercepat pembangunan daerah tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal yang kita junjung tinggi. Saya yakin, dengan pendekatan ini, DIY akan terus menjadi contoh baik dalam penerapan

Smart Province di Indonesia," paparnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda DIY sekaligus sebagai Ketua Pokja Jogja Smart Province (JSP), Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, JSP merupakan salah satu dalam 17 program strategis Gubernur DIY. Made menyampaikan, Per tanggal 19 Juni 2024, DIY telah mengesahkan Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2024, tentang Rencana Induk Jogja Smart Province Tahun 2024-2028. Terdapat beberapa catatan terkait dengan implementasi JSP. Seperti kesesuaian antara redaksi, capaian, klaim output dan pengukuran dampak implementasi. **(Ria)-f**

Dikunjungi Komisi X DPR RI SMPN 5 Yogya Sekolah Percontohan Nasional

YOGYA (KR) - Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengunjungi sejumlah sekolah unggulan di Kota Yogyakarta, salah satunya ke SMP Negeri 5 Yogyakarta, Rabu (20/11). Dalam kunjungan itu, ia ingin melihat program dan fasilitas yang dimiliki sekolah unggulan di Yogyakarta, yang nantinya dijadikan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan untuk kemajuan pendidikan nasional.

Menurut Esti, Kota Yogyakarta termasuk kota dengan kualitas pendidikan yang bagus di tingkat nasional. Ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam kunjungannya di Kota Yogyakarta tersebut, antara lain soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sistem zonasi, serta Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) yang hanya diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kalau untuk Ujian Nasional (UN) tidak bisa di-



KR-Devid Permama

MY Esti Wijayati saat mengunjungi SMPN 5 Yogya.

terapkan di seluruh Indonesia) karena kualitas pendidikan di daerah-daerah tidak sama. Tapi kalau ASPD ini menyesuaikan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah. Nah untuk ASPD ini menarik, dan mungkin bisa diterapkan di daerah lain," kata Esti kepada wartawan di sela kunjungan.

Dari kunjungannya di SMPN 5 Yogyakarta, Esti menilai bahwa kualitas pendidikan di sekolah ini sangat baik. Mulai dari penguatan karakter, implementasi Proyek Penguatan Profil

Pelajar Pancasila (P5), kualitas pembelajaran, interaksi sosial. "Kualitas yang bagus ini ternyata tidak lepas dari fasilitas-fasilitas yang memang telah disiapkan, termasuk dukungan guru, kepala sekolah, komite, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kolaborasi dengan pemerintah," ujarnya.

Esti juga mengapresiasi banyaknya ekstrakurikuler di SMPN 5 Yogya (25 ekskul) yang bisa mewadahi bakat dan minat para siswanya. "Apa yang kita harapkan hampir semuanya ada di sini.

SMPN 5 Yogya ini menjadi percontohan nasional dan bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain," ujarnya.

Kepala SMPN 5 Yogya, Siti Arina Budiastuti MPdBI menyambut baik kunjungan Komisi X DPR RI ke sekolahnya. Kepala sekolah bercita-cita memiliki gedung/ruangan laboratorium representatif yang mewakili sebagai sekolah riset. "Sebetulnya banyak yang ingin kami sampaikan ke Komisi X DPR RI sehingga SMPN 5 bisa semakin maju lagi dan menginspirasi sekolah lain," katanya.

Pj Walikota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mengatakan, Kota Yogyakarta menjadi barometer pendidikan nasional. "Kunjungan Komisi X DPR RI ini untuk melihat kualitas pendidikan di sekolah-sekolah unggulan di Kota Yogya, nantinya dikomparasikan dan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan, untuk kemajuan pendidikan nasional," katanya. **(Dev)-f**

Tim Amikom

Adakan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Sampah

YOGYA (KR) - Bank sampah di Kota Yogyakarta bukan merupakan hal baru yang ditemui. Sebanyak 479 bank sampah terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan beroperasi di 14 kemandren - 45 kelurahan. Hal ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan 'zero sampah' di Kota Yogyakarta. Bank sampah Mitra Insani dikelola oleh kelompok masyarakat di RW XIII yang aktif dalam menjaga lingkungan dan peduli terhadap sampah.

"Bank Sampah Mitra Insani merupakan salah satu bank sampah di Jalan Kauman, Kelurahan Ngupasan berdiri sejak 2013 yang memiliki sekitar 170 nasabah. Selain kegiatan operasional rutin, bank sampah ini juga memiliki kegiatan lain yang bertujuan



KR-Istimewa

Para peserta saat mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan sampah.

untuk menambah kemampuan dan meningkatkan kompetensi pengelola. Di antaranya pelatihan pemberdayaan pengelola bank sampah melalui pelatihan manajemen pengelola bank sampah," kata ketua tim pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat Universitas Amikom Yogyakarta Lilis Dwi Farida didampingi

Akhmad Dahlan, dan Eko Tri Anggono di Yogyakarta, Rabu (20/11).

Menurutnya, pelatihan manajemen pengelola bank sampah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada pengelola dan nasabah dalam pengelolaan bank sampah. Jadi kegiatan itu merupakan salah satu luaran pada pro-

gram Pengabdian kepada Masyarakat Dosen melalui pendanaan Direktorat Akademik Perguruan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Vokasi-Kemendikbud Ristek tahun 2024. Adapun materi yang diberikan mengenai manajemen pengelolaan bank sampah, termasuk susunan pengurus dan legalitasnya. Selain itu juga pengelolaan administrasi dan pelaporan serta penyusunan dan pengelolaan tempat atau ruang kerja bank sampah.

"Selain pelatihan, program pengabdian kami juga memberikan alat penunjang untuk operasional. Seperti timbangan digital dan rak susun. Semua itu dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberdayakan mitra sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal," ungkapnya. **(Ria)-f**

LOWONGAN PEKERJAAN

DIBUTUHKAN DOSEN DAN KARYAWAN UNIVERSITAS JANABADRA (UJB) YOGYAKARTA

UNTUK POSISI

- DOSEN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
- DOSEN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
- STAF / TENAGA KEPENDIDIKAN atau ADMINISTRASI
- TENAGA SATUAN PENGAMANAN
- TENAGA PARKIR

PENERIMAAN LAMARAN

19 - 29 November 2024

INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI WEBSITE janabdra.ac.id

CP : 0813 - 2973 - 9080